

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

(Audited)



KPU KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 4 Mei 2026
Sekretaris,



Eka Sulastri
NIP 198011052008112001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	
Lampiran Keuangan Utama Periode 31 Desember 2025	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Alamat: Jl. Johar No. 1A-78111 Pontianak

Telp. (0561) 740021

Email: Kota_Pontianak@kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Anaudited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 4 Mei 2026
Sekretaris,

Eka Sulastri
NIP. 198011052008112001

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak Tahun 2025 Anaudited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 274.373.988,-** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp0**.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 5.070.487.979,-** atau mencapai **99,77%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 5.082.300.000,-**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 901.321.903,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 0,-**, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp0**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 895.482.313,-** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 5.839.590,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 428.900,-** dan **Rp 900.893.003,-**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp0** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp 5.487.503.882,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **(Rp 5.487.503.882)**, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp 313.553.988,-** dan **Rp (5.173.949.894)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(5.173.949.894)**.

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar **Rp 8.312.423.047,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **(Rp 5.173.949.894),-** kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar **(Rp 5.433.614.141),-** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 3.196.033.991,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp 900.983.003,-**

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th. 2025				Th. 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan PNB	B.1	0	-		0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	-		0	0
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.987.999.000	2.984.908.206	3.090.794	99,90	2.247.471.427
Belanja Barang	B.4	1.792.445.000	1.785.427.799	7.017.201	99,61	64.479.512.886
Belanja Modal	B.5	301.856.000	300.151.974	1.704.026	99,44	179.823.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0		0
JUMLAH BELANJA		5.082.300.000	5.070.487.979	11.812.021	99,77	66.906.807.313

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KPU KOTA PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	7.013.867.310
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	0	393.358.250
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		0	7.407.223.560
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1		-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.204.105.174	3.154.064.626
Gedung dan Bangunan	C.2.3		-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	23.900.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(1.308.622.961)	(2.271.608.770)
JUMLAH ASET TETAP		895.482.313	906.355.856
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-Lain	C.4.2	1.345.031.158	436.839.732
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.339.191.588)	(436.839.732)
JUMLAH ASET LAINNYA		5.839.590	0
JUMLAH ASET		901.321.903	8.313.579.416
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.3	428.900	1.156.369
Hibah yang belum disahkan	C.5.4	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.5.5	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		428.900	1.156.369
JUMLAH KEWAJIBAN		428.900	1.156.369
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	900.893.003	8.312.423.047
JUMLAH EKUITAS		900.893.003	8.312.423.047
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		901.321.903	8.313.579.416
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	900.893.003	8.312.423.047
JUMLAH EKUITAS		900.893.003	8.312.423.047
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		901.321.903	8.313.579.416

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	2.012.850
JUMLAH PENDAPATAN		0	2.012.850
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.984.908.206	2.247.471.427
Beban Persediaan	D.3	0	5.488.237.328
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.611.614.909	54.638.480.174
Beban Pemeliharaan	D.5	158.946.510	308.259.797
Beban Perjalanan Dinas	D.6	407.608.330	8.434.248.742
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	324.425.927	251.204.460
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		5.487.503.882	71.365.881.928
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.487.503.882)	(71.363.869.078)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		212.119.152	163.698.000
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		212.119.152	163.698.000
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		101.434.836	168.580.500
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		101.434.836	173.811.500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(5.251.000)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	313.553.988	332.258.500
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.173.949.894)	(71.031.610.578)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.173.949.894)	(71.031.610.578)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	8.312.423.047	17.043.186.464
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-5.173.949.894	1.031.610.578
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-5.433.614.141	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.4		0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	-23.900.000	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	-5.409.714.141	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.196.033.991	62.300.847.161
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		-7.411.530.044	-8.730.763.417
EKUITAS AKHIR	E.6	900.893.003	8.312.423.047

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker KPU Kota Pontianak

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan Johar No. 1A Pontianak, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota **bertugas**:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penysutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Visi

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak."

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
- Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih,efisien dan efektif.
- Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
- Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Pontianak yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Anaudited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kota Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker KPU Kota Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 Aunaudited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker KPU Kota Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU Kota Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp 5.082.300.000,-** Selama Tahun 2025 dilakukan revisi atas DIPA Awal KPU Kota Pontianak yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.160.520.000	2.987.999.000
Belanja Barang	381.482.000	1.792.445.000
Belanja Modal	0	301.856.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	2.542.002.000	5.082.300.000

Realisasi

Pendapatan Rp
274.373.988,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 274.373.988,-** atau mencapai **0,00%** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 274.373.988,-** Rincian pendapatan Satker KPU Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	274.373.988	0,00
Pendapatan Pendidikan	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	0	274.373.988	0,00

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami perubahan 0 persen dibandingkan TA 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan, Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satker pada TA 2025 adalah sebesar **Rp 5.070.487.979,-** atau **99,77%** dari anggaran belanja sebesar **Rp 5.082.300.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja
Negara Rp
5.070.487.979,-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.987.999.000	2.984.908.206	99,90
Belanja Barang	1.792.445.000	1.785.427.799	99,61
Belanja Modal	301.856.000	300.151.974	99,44
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	5.082.300.000	5.070.487.979	99,77
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah	5.082.300.000	5.070.487.979	99,77

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.984.908.206	2.247.471.427	32,81
Belanja Barang	1.785.427.799	64.479.512.886	(97,23)
Belanja Modal	300.151.974	179.823.000	66,92
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	5.070.487.979	66.906.807.313	(92,42)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp. 2.984.908.206,-

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.984.908.206,-** dan **Rp 2.247.471.427,-** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami **Kenaikan (32,81)** persen dari TA 2024.

Hal ini disebabkan karena tidak dalam waktu Tahapan Pemilu maupun Pilkada.

**Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.140.135.504	803.666.384	41,87%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	830.925.440	827.501.468	0,41%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	127.361.843	-	10000,00%
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	886.485.535	617.043.777	43,67%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	2.984.908.322	2.248.211.629	32,77%
Pengembalian Belanja Pegawai	116	740.202	-100%
Jumlah Belanja	2.984.908.206	2.247.471.427	32,81%

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang Rp
1.785.427.799,-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.785.427.799,-** dan **Rp 64.561.201.586,-** Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami **Penurunan** sebesar **97,23%** dari Realisasi Belanja Barang TA 2025 Hal ini antara lain disebabkan kenaikan tidak adanya kegiatan Tahapan.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	117.224.700	168.017.600	(30,23)
Belanja Barang Non Operasional	307.562.548	47.632.788.647	(99,35)
Belanja Barang Persediaan	-	1.625.625.373	0,00
Belanja Jasa	794.085.711	6.387.140.827	(87,57)
Belanja Pemeliharaan	158.946.510	307.012.197	(48,23)
Belanja Perjalanan Dinas	407.608.330	8.440.616.942	(95,17)
Belanja Barang untuk diserahkan ke	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.785.427.799	64.561.201.586	(97,23)
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	1.785.427.799	64.561.201.586	(97,23)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 300.151.974,-

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 300.151.974,-** dan **Rp 179.823.000,-** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami **kenaikan** sebesar **66,92%** dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh belanja modal di belanjakan pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.151.974	155.923.000	92,50
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	23.900.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	300.151.974	179.823.000	59,91
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	300.151.974	179.823.000	66,92

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00%** dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
300.151.975,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar **Rp 300.151.974,-** mengalami kenaikan sebesar **92,50%** bila dibandingkan dengan TA 2024 sebesar **Rp 155.923.000,-**. Hal ini disebabkan oleh adanya pelantikan P3K dan Penerimaan CPNS.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	300.151.974	155.923.000	92,50
Jumlah Belanja Kotor	300.151.974	155.923.000	92,50
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	300.151.974	155.923.000	92,50

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami **penurunan/peningkatan sebesar 0,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar **0,00** % persen dibandingkan Realisasi 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2025 lebih kecil daripada TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar **00,00** % persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TA 2025 dan 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp 0,-

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPU Kota Pontianak, per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 7.407.223.560,-**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
0,-

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	0	0
Bank MANDIRI BPG 042 KPU Kota Pontianak	0	0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara
Penerimaan Rp 0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Bank MANDIRI BPG 042 KPU Kota Pontianak	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp 0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 7.013.867.310,-**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	7.013.867.310
Jumlah	0	7.013.867.310

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang

akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-Piutang
Jk. Pendek Rp0

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

C.1.8 Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp 0,-*

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 393.356.250,-** Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gudang	0	393.356.250
Jumlah	0	393.356.250

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp 0

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp
895.482.313,-

C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 895.482.313,-** dan **Rp 906.355.856,-** Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPU Kota Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C. 2. 1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp
2.204.105.174,-

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 2.204.105.174,-** dan **Rp 3.154.064.626,-** Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	2.204.105.174
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 31 Desember 2025	2.204.105.174
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-1.308.622.861
Nilai Buku per 31 Desember 2025	895.482.313

Aset Tetap
Lainnya
Rp 0,-

C. 2. 2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 23.900.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah :	-
-	-
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Rp
(1.308.622.861)

C. 2. 3 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp(1.308.622.861)** dan **Rp(2.271.608.770)**. Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2025 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.204.105.174	(1.308.622.861)	895.482.313
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		2.204.105.174	(1.308.622.861)	895.482.313

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka
Panjang
Rp0

Piutang Jangka Panjang KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing - masing debitur adalah sebagi berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang KPU Kota Pontianak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.

Panjang TA 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

Aset Lainnya Rp
5.893.590,-

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPU Kota Pontianak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 5.893.590,-** dan **Rp0**.

Aset Tak
Berwujud
Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Amortisasi s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain - lain
Rp
1.345.031.158,-

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.345.031.158,-** dan **Rp 436.839.732,-**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional KPU Kota Pontianak.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	1.345.031.158
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.345.031.158
Amortisasi s.d 31 Desember 2025	1.339.191.568
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.839.590

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(1.339.191.568
)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp (1.339.191.568)** dan **Rp (436.839.732)**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

**Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2025**

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lain-lain	1.345.031.158	1.339.191.568	5.839.590
	Jumlah	-	-	-
	Total	1.345.031.158	1.339.191.568	5.839.590

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp 428.900,-

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 428.900,-** dan **Rp1.156.369,-**

Uang Muka dari
KPPN Rp 0,-

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
428.900,-

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 428.900,-** dan **Rp1.156.369,-** Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga KPU Kota Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	428.900
	Total	428.900

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury National Pooling (TNP)** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Tagihan PDAM Bulan Desember 2025 yang dibayar pada Bulan Januari 2026.

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp
900.893.003,-

C. 7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 900.893.003,-** dan **Rp8.312.423.047,-**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp 0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Pendidikan	0	0
Pendapatan Lain - lain	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN dan iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp
2.984.908.206,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.984.908.206,- dan Rp 2.247.471.427,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	766.325.200	567.325.200	35,08
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(116)	(740.202)	
Beban Pembulatan Gaji	13.357	8.704	53,46
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	61.428.604	47.185.100	30,19
Beban Tunjangan Anak PNS	19.890.147	15.940.088	24,78
Beban Tunjangan Struktural PNS	47.880.000	44.280.000	8,13
Beban Tunjangan Fungsional PNS	20.346.000	14.406.000	41,23
Beban Tunjangan PPh PNS	19.797.856	19.549.052	1,27
Beban Beban Tunj. Beras PNS	45.407.340	34.182.240	32,84
Beban Uang Makan PNS	137.472.000	47.540.000	189,17
Beban Tunjangan Umum PNS	21.575.000	12.510.000	72,46
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0,00
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	830.925.440	827.501.468	0,41
Belanja Gaji Pokok PPPK	82.958.100	0	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	871	0	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.572.080	0	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.230.672	0	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.940.000	0	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.228.120	0	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	22.012.000	0	100,00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.420.000	0	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kecamatan/Kinerja)	807.675.135	617.043.777	30,89
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kecamatan/Kinerja PPPK	78.810.400	0	100,00
Jumlah Beban	2.984.908.206	2.246.731.427	32,86

Beban

Persediaan Rp

0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 5.488.237.328,-** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Beban Persediaan Konsumsi	0	5.488.237.328
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0

Beban Barang dan

Jasa Rp

1.611.614.909,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.611.614.909,-** dan **Rp 54.638.460.174,-** Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi

yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	60.464.700	62.873.600	(3,83)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	(490.200)	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56.760.000	76.424.000	(25,73)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	28.720.000	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	(7.697.900)	
Beban Bahan	289.235.548	8.379.268.197	(96,55)
Beban Honor Output Kegiatan	0	29.281.636.000	(100,00)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	(66.380.000)	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.908.200	9.971.080.250	(99,85)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.224.000	999.000	222,72
Beban Langganan Listrik	59.451.964	88.534.054	(32,85)
Beban Langganan Telepon	0	0	0,00
Beban Langganan Air	3.894.800	11.704.900	(66,73)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Sewa	393.356.250	1.154.450.000	(65,93)
Beban Jasa Profesi	4.500.000	278.326.682	(98,38)
Beban Jasa Lainnya	725.819.447	5.379.011.591	(86,51)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan Rp
158.946.510,-

Beban Pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 158.946.510,-** dan **Rp 306.259.797,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset-asset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.773.400	221.451.000	(66,69)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.173.110	85.561.197	(0,45)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	(752.400)	
Jumlah Beban	158.946.510	306.259.797	(67)

Beban Perjalanan
Dinas Rp
407.608.330,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 407.608.330,-** dan **Rp 8.434.248.742,-**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi badan Adhoc dan KPU Kota Pontianak, serta adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	(6.368.200)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	262.469.330	1.391.967.642	(81,14)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000	4.915.375.000	(99,87)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138.739.000	2.067.303.000	(93,29)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	65.971.300	(100,00)
Jumlah Beban	407.608.330	8.434.248.742	(95,17)

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024
(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban**Penyusutan dan****Amortisasi Rp**

166.995.214

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 324.425.927,-** dan **Rp 251.204.460,-** Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**Tahun 2025 dan Tahun 2024**(dalam rupiah)*

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	322.243.147	251.204.460	28,28
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	2.182.780		
Jumlah Penyusutan	324.425.927	251.204.460	29,15
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00

Beban Penyisihan**Piutang Tak****Tertagih Rp0****D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional
Rp0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 8.312.423.047

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 8.312.423.047,-** dan **Rp 17.043.186.464,-**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

Rp(5.173.949.894)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(5.173.949.894)** dan **Rp(71.031.610.578)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan Akuntansi

Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp0**.

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset
Rp0

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(23.900.000)

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(23.900.000) dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp (5.409.714.141)

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp (5.409.714.141) dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas Rp.
3.196.033.991,-

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 3.196.033.991,-** dan **Rp 62.300.847.161,-** Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-274.373.988
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.466.447.979
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	3.960.000
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	3.196.033.991

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar **Rp 0** sedangkan DKEL sebesar **Rp(222.652.802)**.

E. 5. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 **Rp3.960.000,-** Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp0**.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp 7.013.867.310,-** dari total NPHD pada tahun 2023 sebesar **Rp 30.997.521.000,-** yang sudah terealisasi pada tahun 2024 sebesar **Rp 23.983.653.690,-** realisasi di tahun 2025 sebesar **Rp. 1.604.040.000,-**

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah **Rp 5.409.827.310,-**

E. 6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp 900.893.003,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 900.893.003,-** dan **Rp 8.312.423.047,-**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Satker KPU Kota Pontianak dalam kondisi rusak berat sebanyak 3 unit mobil dan 1 unit motor, sudah terbit SK-nya.

F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Eka Sulastris
Pejabat Pembuat Komitmen	: Syarifah Alifiah
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Dolasapta Dwi Hastri
Bendahara	: Nina Noviana
Pengelola Keuangan	: Rachmawati

2. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melakukan Revisi Anggaran DIPA sebanyak 17 kali melalui Kantor DJA oleh KPU RI dalam rangka pemenuhan anggaran 2025.
3. Bahwa terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak perolehan dari denda keterlambatan pengaduan barang/jasa dari penyedia sebesar Rp. 0
4. Bahwa terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (5.487.503.882);
5. Bahwa terdapat Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar (5.173.949.894);

6. Bahwa terdapat Surplus/Defisit LO sebesar (5.713.949.894);
7. Bahwa terdapat koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp. 0.
8. Bahwa terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.3.196.033.991;
9. Bahwa terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (7.411.530.044);
10. Bahwa terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp. 900.893.003;
11. Bahwa KPU Kota Pontianak telah menerbitkan SP4HL dana hibah pemilihan tahun 2024 sebesar Rp 5.409.827.310,-
12. Bahwa KPU Kota Pontianak terdapat belanja barang yang dibayar di muka (*Prepaid*) di periode akhir laporan tanggal 31 Desember 2025 berupa sewa gudang logistik untuk Pemilu 2024 selama 2 tahun sebesar Rp.0,-

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUP.AH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 078 } KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : { 01 } KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : { 1300 } KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : { 058532 } KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/2026 0:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/2026 1:51 PM

Halaman : 1

bp_neraca_percobaan_kas_satker_pos

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,070,487,979
0.0	313121	DITERIMA DAR. ENTITAS LAIN	274,373,988	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahalangan BMN Lainnya	0	212,118,152
3.0	425912	Perzinaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	62,254,836
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	766,325,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,357	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suksesi PNS	61,428,604	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,990,147	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	20,346,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,797,856	0
3.0	511128	Belanja Tunj. Bonus PNS	45,407,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	137,479,030	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,575,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	630,925,440	0
3.0	511611	Belanja Saji Pokok PPPK	82,958,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	874	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suksesi PPPK	4,572,080	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,230,672	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,940,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Bonus PPPK	6,220,120	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,012,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,420,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	607,675,126	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	78,810,400	0
3.0	521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	60,464,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,760,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	289,235,548	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,103,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Eksisting/Baru	3,284,000	0
3.0	522111	Belanja Anggaran Listrik	59,451,964	0
3.0	522113	Belanja Anggaran Air	4,314,300	0
3.0	522151	Belanja Jasa Pabean	4,500,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	725,819,447	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70,773,400	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,173,110	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262,489,320	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,400,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 1:51 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138,739,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300,151,974	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	116
JUMLAH			5,344,862,083	5,344,862,083

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKA SULASTRI
198011052008112001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : [01] KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : [1300] KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : [653532] KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_aktual_sakeer_pnc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,204,105,174	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,300,622,681
0.0	160112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,345,081,159	0
0.0	168122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,338,191,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	428,900
0.0	313111	Diagihkan ke Entitas Lain	0	3,466,447,979
0.0	313121	Utang dari Entitas Lain	274,373,938	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,300,000
0.0	391111	Ekuitas	0	6,312,423,047
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	23,500,000	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	5,409,714,141	0
0.0	425128	Pendapatan dan Pemendatanganan BMM Lainnya	0	212,119,152
0.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	62,254,635
0.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	39,100,000
0.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	765,825,200	0
0.0	511115	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,241	0
0.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61,428,804	0
0.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,600,147	0
0.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,890,000	0
0.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	23,346,000	0
0.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	19,797,856	0
0.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	45,407,340	0
0.0	511129	Beban Uang Makan PNS	137,472,000	0
0.0	511131	Beban Tunjangan Umum PNS	21,575,000	0
0.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	630,925,440	0
0.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	429,568,100	0
0.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	071	0
0.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,572,080	0
0.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,230,872	0
0.0	511624	Beban Tunjangan Struktural PPPK	5,940,000	0
0.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,228,120	0
0.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	22,012,000	0
0.0	511630	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,420,603	0
0.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	807,675,035	0
0.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	78,810,403	0
0.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	60,464,700	0
0.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,760,000	0
0.0	521211	Beban Bahan	269,235,640	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 1:51 PM
 Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	14,908,200	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,224,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	59,451,984	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,894,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	393,356,250	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	725,819,447	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73,773,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,173,110	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	262,469,330	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,400,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138,739,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	322,243,147	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,182,780	0
JUMLAH			14,744,628,343	14,744,628,343

Keterangan :
 FINAL

Pontianak, 4 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 EKA SULASTRI
 NIP.198011052008112001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 1:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	7,013,867,310	(7,013,867,310)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	303,356,250	(303,356,250)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	7,407,223,560	(7,407,223,560)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,204,105,174	3,154,064,626	(949,959,452)	(30.12)
Aset Tetap Lainnya	0	23,900,000	(23,900,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,308,622,861)	(2,271,608,770)	962,985,909	(42.39)
JUMLAH ASET TETAP	895,482,313	906,355,856	(10,873,543)	(1.20)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,345,031,158	436,839,732	908,191,426	207.90
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,339,191,568)	(436,839,732)	(902,351,836)	206.56
JUMLAH ASET LAINNYA	5,839,590	0	5,839,590	
JUMLAH ASET	901,321,903	8,313,579,416	(7,412,257,513)	(89.16)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	428,900	1,156,369	(727,469)	(62.91)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	428,900	1,156,369	(727,469)	(62.91)
JUMLAH KEWAJIBAN	428,900	1,156,369	(727,469)	(62.91)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	900,893,003	8,312,423,047	(7,411,530,044)	(89.16)
JUMLAH EKUITAS	900,893,003	8,312,423,047	(7,411,530,044)	(89.16)
JUMLAH EKUITAS	900,893,003	8,312,423,047	(7,411,530,044)	(89.16)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	901,321,903	8,313,579,416	(7,412,257,513)	(89.16)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKA SULASTRI

NIP.198011052008112001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 074
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KOTA PONTIANAK 658332

Tgl Data : 04/05/25 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/25 1:49 PM
 Halaman : 1
 by: ke_faca walker, nsa, paa

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Pencatatan Negara Bukan Pajak	0	274,373,888	274,373,888	0	0	222,264,650	(222,264,650)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penanaman Negara Bukan Pajak Lainnya	0	274,373,888	274,373,888	0	0	222,264,650	(222,264,650)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	274,373,888	274,373,888	0	0	222,264,650	(222,264,650)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintahan Pusat	5,082,300,000	5,070,487,979	(1,812,021)	100	87,526,520,300	68,906,907,313	621,712,887	69
1. Belanja Pegawai	2,987,399,000	2,984,936,206	(3,050,794)	100	2,250,520,300	2,247,471,427	13,048,973	99
2. Belanja Barang	1,792,445,000	1,785,427,759	(7,017,241)	100	64,787,167,300	64,476,512,886	307,654,414	100
3. Belanja Modal	301,856,000	300,151,974	(1,704,026)	99	490,823,000	179,823,000	301,010,000	37
4. Belanja Pembiayaan Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA PONTIANAK 658532

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 1:49 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,082,300,000	5,070,487,979	(11,812,021)	100	67,528,520,000	66,906,807,313	621,712,687	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKA SULASTRI
NIP. 198011052008112001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 1:49 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,312,423,047	17,043,186,464	(8,730,763,417)	(51.23)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,173,949,894)	(71,031,610,578)	65,857,660,684	(92.72)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(5,433,614,141)	0	(5,433,614,141)	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(23,900,000)	0	(23,900,000)	0
LAIN-LAIN	(5,409,714,141)	0	(5,409,714,141)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,196,033,991	62,300,847,161	(59,104,813,170)	(94.87)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,411,530,044)	(8,730,763,417)	1,319,233,373	(15.11)
EKUITAS AKHIR	900,893,003	8,312,423,047	(7,411,530,044)	(89.16)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 4 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EKA SULASTRI
 NIP 198011052008112001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 1:48 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,012,850	(2,012,850)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	2,012,850	(2,012,850)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	2,012,850	(2,012,850)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,984,908,206	2,247,471,427	737,436,779	32.812
Beban Persediaan	0	5,488,237,328	(5,488,237,328)	(100)
Beban Barang dan Jasa	1,611,614,909	54,638,460,174	(53,026,845,265)	(97.05)
Beban Pemeliharaan	158,946,510	306,259,797	(147,313,287)	(48.101)
Beban Perjalanan Dinas	407,608,330	8,434,248,742	(8,026,640,412)	(95.167)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (658532) KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 1:49 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	324,425,927	251,204,460	73,221,467	29.148
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,467,503,882	71,365,881,928	(65,878,378,046)	(92.311)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,467,503,882)	(71,363,869,078)	65,876,365,196	(92.311)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	212,119,152	163,698,000	48,421,152	29.58
Pendapatan Pelepasan Aset	212,119,152	163,698,000	48,421,152	29.58
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	101,434,836	168,580,500	(67,125,664)	(39.823)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	101,434,836	173,811,500	(72,376,664)	(41.641)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,251,000	(5,251,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	313,553,988	332,258,500	(18,704,512)	(5.63)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,173,949,894)	(71,031,610,578)	65,857,660,684	(92.716)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,173,949,894)	(71,031,610,578)	65,857,660,684	(92.716)

Keterangan :

FINAL

